

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Moral Disengagement

Menurut Bandura (Detert & Trevino, 2008: 374) menegaskan bahwa orang – orang dapat membuat keputusan tidak etis karena proses regulasi diri moralnya tidak aktif pada saat terjadi penggunaan mekanisme kognitif yang berkaitan secara bersama – sama. Ketidak aktifan regulasi diri moral ini disebut *Moral Disengagement*. Di tahun 1999, Bandura dalam jurnalnya yang berjudul *Moral Disengagement In The Perpetration Of Inhumanities*, mengembangkan catatan tentang *moral disengagement* ini sebagai perluasan teori kognitif-sosial. Teori sosial-kognitif menawarkan suatu perspektif dalam tingkah laku manusia dimana individu berlatih mengontrol pikiran dan tingkah laku mereka melalui proses regulasi diri. Sesuai dengan teori sosial-kognitif, agen moral dituntut oleh sistem regulasi diri, termasuk monitoring diri dalam tindakannya seperti halnya reaksi diri untuk melakukan sesuatu berdasarkan standar moral internal. Maka banyak orang mengembangkan standar personal dari tingkah laku moralnya yang memperlihatkan adanya peran regulasi diri. Standar ini akan menuntun untuk bertingkah laku baik dan menghindari tingkah laku buruk karena individu menggunakan standar personal mereka untuk antisipasi, memonitor dan menilai tindakan mereka sendiri. Dengan cara-cara ini, maka yang

menghasilkan standar ini disebut sensor diri. Jadi, individu biasanya menggunakan cara-cara yang konsisten dengan standar moral internal, sebab mereka mengantisipasi dalam melakukan evaluasi positif maupun negatif untuk memilih tindakan yang mungkin dilakukan. Namun, fungsi regulasi diri ini akan beroperasi dan bekerja jika diaktifkan.

Selanjutnya Bandura mengemukakan bahwa regulasi moral dapat diaktifkan dan tidak diaktifkan sesuai keinginan. *Moral disengagement* adalah kunci proses ketidak aktifan. Melalui *moral disengagement*, individu membebaskan diri dari sanksi diri dan juga rasa bersalah yang terjadi pada saat tingkah lakunya melanggar standar moral internal, dan akhirnya mereka membuat keputusan tidak etis. Bandura menyatakan (Detert & Trevino, 2008: 374–391) bahwa regulasi diri moral dapat tidak aktif atau tercerabut (lepas) dengan melalui 8 mekanisme yang saling berkaitan. 8 mekanisme yang saling berkaitan atau indikator dari *Moral Disengagement* tersebut adalah :

1. Justifikasi moral

Justifikasi moral disini merupakan suatu proses dimana individu melakukan tindakan buruk kepada diri sendiri atau orang lain, tetapi proses melakukan tindakan tersebut tampak dibenarkan secara moral. Contohnya : Jika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan tersebut maka akan dicela oleh teman-temannya, dan melakukan tindakan tersebut atas dasar motif untuk tidak dicela teman-temannya.

## 2. Penghalusan istilah

Penggunaan suatu bahasa netral secara moral oleh seseorang untuk membuat suatu perilaku buruk menjadi suatu perilaku yang terlihat tidak terlalu buruk, bahkan terlihat baik.

## 3. Perbandingan yang menguntungkan

Bahwa sikap seseorang yang tidak etis akan berbahaya bila dibandingkan dengan sebuah perilaku etis. Sehingga, membuat sikap aslinya yang muncul dapat diterima. Misalnya, apa yang dilakukan seseorang tersebut tidak ada apa-apa dibandingkan dengan hal-hal lain yang telah dilakukan baru-baru ini.

## 4. Melemparkan tanggung jawab

Melemparkan tanggung jawab merupakan perbuatan seseorang yang tidak mau meneman tanggung jawabnya karena akibar dari perbuatan perintah otoritatif dari atasan atau seseorang yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang memukuli temannya karena perintah dari kakak kelasnya atau seniornya.

## 5. Mengaburkan tanggung jawab

Artinya bahwa tidak ada satu anggota grup secara pribadi yang merasa bertanggung jawab terhadap grup secara kolektif terhadap apa yang terjadi secara baik ataupun buruk terhadap suatu grup tersebut. Misalnya, salah satu anggota grup atau kelompok tersebut tidak merasa buruk tentang hal yang terjadi pada suatu

kelompok karena menurutnya semua anggota kelompok mempunyai bagian atas apa yang telah dilakukan terhadap kelompok tersebut.

6. Tidak menghargai atau mendistorsi konsekuensi

Selalu menggampangkan atau tidak memperdulikan konsekuensi atau resiko dari apa yang telah dilakukan meskipun tarafnya kecil. Hal ini sama saja tidak menghargai apa yang telah dilakukan. Misalnya, seseorang yang selalu beranggapan bahwa mengambil uang yang jumlahnya sedikit tidak akan berpengaruh apa-apa didalam perusahaan tersebut.

7. Dehumanisasi

Seseorang yang tidak menganggap dirinya sendiri atau orang lain seperti pada manusia umumnya. Misalnya, seseorang yang mempunyai kelakuan seperti binatang, karena itu seseorang tersebut layak untuk diperlakukan sama halnya dengan binatang.

8. Menyalahkan orang

Seseorang yang bersikap diri dengan menempatkan kesalahan atas perilaku yang dia lakukan kepada orang lain. Misalnya, seseorang yang tertangkap tangan saat mencontek melemparkan kesalahan kepada teman yang dicontek tersebut dan membela dirinya sendiri.

Tiga mekanisme yang pertama yaitu justifikasi moral, penghalusan istilah, perbandingan yang menguntungkan meliputi kesalahan pengertian kognitif tentang tingkah laku sebagai suatu cara untuk meningkatkan penerimaan moral. Mekanisme berikutnya adalah melemparkan tanggung

jawab, mengaburkan tanggung jawab dan tidak menghargai terjadi saat individu mengaburkan atau mendistorsi efek dari tindakan yang merugikan. Untuk dehumanisasi dan menyalahkan orang dapat terlepas dari sanksi moral dengan mengurangi identifikasi pada tujuan tindakan yang merugikan (Kurtinez & Gewirtz, 1991 : hal 71-93).

Jadi, *moral disengagement* dalam penelitian ini adalah regulasi diri seseorang yang tidak aktif, sehingga individu menjadi melakukan keputusan yang tidak etis dengan dukungan aspek-aspek kognitif, afektif dan lingkungan. Regulasi diri moral yang tidak aktif ini dapat terjadi dengan melalui 8 mekanisme atau indikator yang saling berkaitan, 8 mekanisme atau indikator tersebut adalah justifikasi moral, penghalusan istilah, perbandingan yang menguntungkan, melemparkan tanggung jawab, mengaburkan tanggung jawab, tidak menghargai atau mendistorsi konsekuensi, dehumanisasi dan menyalahkan orang. Dapat dikatakan pula bahwa *moral disengagement* ini memfasilitasi tindakan moral buruk seseorang.

## **2. Pertimbangan Moral**

### **a. Pengertian Moral**

Menurut Frankena dalam (Harris, 1976: 32) hal atau cakupan moralitas adalah penalaran (pertimbangan) berdasar aturan, prinsip, idealisasi yang menyatakan tindakan sebagai benar, salah, baik, buruk yang memiliki pengaruh pada perasaan, interes, idealisasi terhadap orang lain atau pengalaman tertentu, baik secara aktual atau hipotetis atau juga yang

memiliki pengaruh pada kemanusiaan. Moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia. Jadi tidak hanya mengenai baik buruknya dalam satu segi atau sektor tertentu, misalnya sebagai tukang masak, pemain bulu tangkis atau penceramah, melainkan baik buruknya sebagai manusia (Suseno, 1987: 19).

Moral dianggap dekat dengan kata etika (Bertens, 1993: 4-5), karena etimologi antara kata etika dan moral sama, yaitu berarti adat kebiasaan, hanya etika berasal dari bahasa Yunani bentuk tunggal *ethos*, dan bentuk jamak *ta etha*. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin bentuk tunggal *mos*, bentuk jamaknya *mores*. Selanjutnya etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :

- 1) Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak).
- 2) Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.
- 3) Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Selanjutnya Bertens menegaskan bahwa moral berarti nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Jadi, persamaan antara etika dan moral dalam arti bahwa keduanya merupakan nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Moral didefinisikan oleh ahli-ahli ilmu sosial (Bornstein & Lamb, 1992: 445-447) yaitu :

1) *Morality as respect for social rules*

Moral dalam hal ini diartikan sebagai penghargaan terhadap aturan-aturan sosial, yang dalam hal ini dikemukakan oleh Piaget, sedang bagi Durkheim, nilai-nilai moral ada dalam masyarakat, sehingga aturan sosial dalam hal ini menjadi instrumen utama untuk komunikasi moral dalam dan antar generasi.

2) *Morality as a justice*

Hal ini ada pada teori Kohlberg, yang mendefinisikan moral sebagai struktur keadilan, dimana akhir dari semua tindakan moral, petunjuk dan sanksi harus menjamin keadilan bagi individu. Konsep moral sebagai *justice* berarti menekankan kondisi manusia seperti kesetaraan, kebebasan, timbal balik dan menghargai kehidupan. Kebenaran bagi semua orang bersifat universal. Moral merupakan prioritas melebihi berbagai kumpulan norma sosial, aturan atau konvensi.

3) *Morality as a care*

Pemikiran ini dikenakan pada pemikir feminis, seperti Gilligan, Chodorow, yang menyatakan bahwa ada asosiasi empiris antara perkembangan perempuan dan orientasi kepedulian. Ada cara-cara yang berbeda pada remaja perempuan dan remaja laki-laki tentang pengertian diri. Remaja perempuan membangun identitas

awal mereka berkaitan dengan diri sendiri dan ibunya (biasanya sebagai pengasuh pertama), sementara remaja laki-laki mengidentifikasi diri mereka dengan memisahkan dari jenis kelamin yang berlawanan, yaitu ibu. Dalam prosesnya, remaja perempuan berorientasi menuju hubungan dan kepedulian, sedang remaja laki-laki berorientasi menuju pemisahan, hak-hak individu dan butuh melindungi hak-hak, melakukan aturan-aturan dan undang-undang keadilan.

#### **b. Nilai Moral**

Nilai moral tidak terpisahkan dari nilai – nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu bobot moral, bila diikuti sertakan dalam tingkah laku moral. Sebagai contoh adalah kejujuran, merupakan suatu nilai moral, namun kejujuran menjadi kosong apabila tidak diterapkan pada nilai lain, misalnya adalah nilai ekonomis. Nilai moral meskipun nampak menumpang pada nilai – nilai lain, namun tampak sebagai suatu nilai baru bahkan sebagai nilai yang paling tinggi.

Ciri – ciri dari nilai moral (Bertens K, 1993: 26-27) yaitu :

##### a. Berkaitan dengan tanggung jawab.

Nilai – nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia, namun lebih spesifik lagi berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai moral mengakibatkan seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena dia bertanggung jawab. Sebagai contoh, seorang anak yang tidak mempunyai inteligensi tinggi atau tidak cantik,

bisa saja disesali, namun atas keadaan tersebut, dia dan orang tuanya tidak bertanggung jawab. Nilai dalam contoh tersebut bukan nilai moral. Sedangkan nilai moral hanya dan diwujudkan dalam perbuatan – perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang itu sendiri. Dalam nilai moral, mensyaratkan adanya kebebasan dan tanggung jawab.

b. Berkaitan dengan hati nurani

Semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan khusus, pada nilai moral tuntutannya lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai moral merupakan semacam imbauan dari hati nurani. Ciri khas nilai moral adalah hanya nilai inilah yang menimbulkan suara dari hati nurani, baik yang menuduh, karena orang meremehkan atau menentang nilai – nilai moral atau memuji bila orang mewujudkan nilai – nilai moralnya.

c. Mewajibkan

Nilai moral mewajibkan secara absolut dan tak bisa ditawar-tawar. Sebagai contoh adalah bila seseorang memiliki nilai estetis, maka dia akan menghargai lukisan yang bermutu, sebaliknya orang lain boleh saja tidak menghargai lukisan tersebut. Namun pada nilai moral, orang harus mengakui dan harus merealisasikan. Imanuel Kant membedakan antara *imperatife hipotesis* dan *imperatife kategoris*. Nilai moral mengandung imperative (perintah) kategoris, sedang nilai-nilai lain berkait dengan *imperatife hipotesis*.

Kewajiban absolute melekat pada nilai-nilai moral, karena nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Nilai moral menyangkut pribadi manusia sebagai suatu totalitas. Bila seseorang gagal dalam bidang moral, hal ini berarti kegagalan total sebagai manusia, bukan menurut sebagai suatu aspek saja.

d. Bersifat formal

Max Scheler menyatakan bahwa nilai-nilai moral membongkang pada nilai-nilai lain. Hal ini berarti dalam merealisasikan nilai-nilai moral seseorang mengikut sertakan nilai-nilai lain dalam suatu tingkah laku moral. Tidak ada nilai moral yang murni, terlepas dari nilai-nilai lain.

**c. Norma moral**

1. Macam-macam moralitas (Franz Magnis Suseno, 1987: 33) :

Ada berbagai pendapat tentang hal yang berkaitan dengan moralitas.

- a) Moralitas adalah kualitas perbuatan manusia yang dengan itu orang berkata bahwa perbuatan itu benar salah, baik buruknya perbuatan manusia.
- b) Moralitas objektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai suatu perbuatan yang telah dikerjakan, bebas dari pengaruh-pengaruh pihak pelaku.
- c) Moralitas subyektif adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai perbuatan yang dipengaruhi pengertian dan persetujuan si

pelaku sebagai individu, dalam hal ini dipengaruhi latar belakang, kondisi pendidikan dan sifat pribadi.

- d) Moralitas intrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan menurut hakikatnya bebas dari setiap bentuk hukum positif.
- e) Moralitas ekstrinsik adalah moralitas yang memandang perbuatan sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dilarang oleh seseorang yang berkuasa atau hukum positif, baik dari manusia atau dari Tuhan.

## 2. Relativisme Moral

Norma moral tidak mengawang diudara, namun termuat dalam suatu sistem etis yang menjadi bagian kebudayaan. Namun karena ada banyak kebudayaan, maka norma moral yang mereka miliki bisa berbeda pula. Para ahli yang menganut relativisme moral berpendapat bahwa perbuatan yang lazim dilakukan dalam suatu kebudayaan berarti sama dengan suatu perbuatan adalah perbuatan baik secara moral. Namun, pendapat ini ditentang oleh mereka yang menyakini bahwa moral sifatnya universal dan relativisme moral dianggap tidak dapat dipertahankan. Bila relativisme moral menganggap norma moral relatif, sebaliknya pada universalitas norma moral bersifat absolute (Pratiwi Wahyu W, 2005: 34-35). Bila belajar dari sejarah memang terdapat norma moral yang sudah berubah. Relativisme moral dalam hal ini benar, dalam arti tidak selalu dan dimana-mana norma moral yang digunakan sama. Namun yang penting adalah perubahan norma tidak menempuh

arah apa saja, perubahan norma selalu menuju ke penyempurnaan norma. Contoh kongkrit dalam hal ini yaitu orang-orang Eskimo yang membunuh orang tua mereka jika dalam keadaan lemah atau sakit pada suatu masa tertentu. Menurut ahli-ahli etika harus dibedakan antara norma moral dasar dan norma moral kongkrit. Bagi orang Eskimo membunuh orang tua dalam hal ini merupakan keharusan moral (norma moral kongkrit), namun perbuatan tersebut adalah *mercy killing*. Motif membunuh orang tua adalah justru berbuat baik terhadap mereka, daripada orang tua tersebut menerima nasib yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu, dibalik norma kongkrit terdapat norma dasar, yaitu berbuat baik kepada sesame. Bila terjadi perubahan norma maka arah perkembangan tidak bisa dibalik.

3. Norma moral bersifat objektif dan universal (Pratiwi Wahyu W, 2005: 35-36).

a) Objektivitas norma moral

Suatu nilai selalu berkaitan dengan subjeknya, artinya nilai bersifat subjektif. Nilai selalu merupakan nilai untuk seseorang. Karena nilai moral menyatakan suatu norma moral, maka dalam norma moralpun ada unsur subjektif. Tanpa ada subjek moral, norma moral tidak mempunyai makna apapun.

Nilai dan norma moral mewajibkan orang dan tidak tergantung pada selera subjektif orang. Orang menyukai atau tidak menyukai buah apel, bisa bersifat subjektif, namun baik

buruknya sesuatu dalam arti moral tidak tergantung dari selera pribadi, jadi ada objektivitas. Norma moral bersifat mewajibkan orang, karena secara objektif mengarahkan orang tersebut. Orang harus taat pada norma moral. Namun meskipun norma moral bersifat objektif, tidak berarti kebebasan ditiadakan. Norma moral dapat menjadi norma yang sungguh-sungguh karena ada kebebasan.

b) Universalitas norma moral

Universalitas berarti harus berlaku selalu dan dimana-mana. Sebagai contoh adalah norma kejujuran berlaku dimana-mana. Ada yang menolak universalitas moral yaitu etika situasi, yang menyatakan bahwa tidak ada norma-norma moral umum, sebab setiap situasi berbeda. Dalam bentuk yang ekstrim, etika situasi tidak dapat dipertahankan, namun ada unsur-unsur kebenarannya. Pertimbangan kritis tentang universalitas dan etika situasi adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuatan-perbuatan moral tertentu tidak tergantung situasi, misalnya pemerkosaan tidak pernah dapat diterima sebagai cara untuk memenuhi nafsu seksual, bagaimanapun situasinya.
- 2) Selain menolak etika situasi yang ekstrim, orang juga harus menolak lawannya, yaitu legalisme moral. Legalisme moral adalah kecenderungan untuk menegakkan norma moral

secara buta, tanpa memperhatikan sedikitpun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja, dalam hal ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain (Franz Magnis Suseno, 1987: 34-35).

#### **d. Pertimbangan Moral**

Pada definisi moral yang kedua dari Bornstein & Lamb (1992: 445-447), Kohlberg dianggap sebagai pengembang teori perkembangan moral. Kohlberg pada awalnya tertarik dengan karya klasik tentang tingkah laku dari Harstone & May (1928) (Gewirtz dalam Kurtinez & Gewirtz, 1991: 2-3). Menurut Kohlberg, Harstone dan May menemukan tidak ada konsistensi dalam tingkah laku moral tentang kebajikan atau kebaikan, kejujuran, tindakan prososial dan kontrol diri, namun hal ini tidak berarti bahwa tingkah laku yang menunjukkan kebaikan tersebut dipengaruhi oleh pendidikan karakter tradisional. Kohlberg kemudian memfokuskan pada tulisan Piaget tentang perkembangan moral dan kognitif. Kohlberg melakukan pendekatan empiris terhadap psikologi perkembangan kognitif dan moral yang diawali dengan konsepsi teoritis dan laporan empiris Piaget. Selanjutnya Kohlberg menemukan konsep-konsep yang berasal selain dari Piaget, yaitu misalnya interaksionis simbolis dari G.H. Mead (1934), juga temuan pada karya-karya awal James Mark Baldwin (1897, 1906-1911). Dari tulisan Baldwin, Kohlberg menemukan gagasan epistemologi genetik dan penalaran moral, konsep skema, asimilasi dan akomodasi. Dari Baldwin

pula, Kohlberg menyatakan bahwa proses imitasi dianggap sebagai dasar dari *self*. Bersama-sama dengan Piaget, Kohlberg memberi perhatian pada karya Baldwin. Apresiasi Kohlberg adalah pendekatan perkembangan kognitif, sosial dan moral. Kohlberg dipengaruhi oleh Piaget, terutama dalam dua gagasan dasarnya yaitu : 1) struktur mental kognitif dan 2) tahap (Santo & Cremers, 1995: 20-21). Menurut Piaget, anak adalah seorang filsuf yang membangun dan menyusun dunia hidup serta arti mengenai sejumlah kategori dan soal universal, seperti misalnya soal keadilan. Kohlberg mengambil alih pendapat Piaget, tentang struktur itu sendiri, yang dengannya anak menyusun dunia serta artinya secara aktif konstruktif sambil menunjukkan timbulnya struktur kognitif sebagai hasil interaksi antar organisme dengan lingkungannya.

Selanjutnya Kohlberg menegaskan pengandaian tahap, yaitu bahwa setiap konstruksi mental kognitif secara kualitatif bersifat khas, boleh disebut sebagai ‘tahap’, dan ternyata terdapat suatu ukuran tahap yang tetap dan tak dapat dibalik yang harus dilewati setiap orang. Kohlberg melebihi Piaget, dalam hal pendapat adanya hubungan antara perkembangan tahap dengan tersedianya kesempatan dalam lingkungan sosial anak untuk mengambil peran orang lain.

Dalam perbandingan antara Piaget dengan Kohlberg, menurut Arbuthnot & Faust dalam (Kusdwiratri, 1982: 74), dikemukakan bahwa

- a) teori Kohlberg lebih spesifik dan lebih kompleks dibanding Piaget;

- b) data Kohlberg menunjukkan bahwa periode perkembangan penalaran moral lebih panjang dibandingkan Piaget. Bila Piaget mengemukakan tiga tahap perkembangan penalaran moral, Kohlberg mengemukakan enam tahap, bahkan di tulisan-tulisan terakhirnya Kohlberg mengemukakan ada tujuh tahap, dimana tahap tujuh merupakan pendalaman penalaran moral dan memasuki arena keyakinan religi ( Huffman, Vernoy & Vernoy, 1981: 303).
- c) menurut Kohlberg individu pada umumnya baru mencapai kematangan moral sampai usia 25 tahun, sedangkan menurut Piaget, kematangan moral dicapai individu pada masa remaja. Jadi, menurut Kohlberg proses perkembangan moral berlangsung terus melampaui tahap usia remaja sampai ke tahap usia dewasa awal, bahkan mungkin dewasa tengah. Namun banyak pula individu yang tidak pernah mencapai tahap terakhir perkembangan moralnya.
- d) Piaget lebih memusatkan pada perkembangan penalaran terhadap masalah-masalah fisik atau logika, sedangkan Kohlberg memusatkan pada penalaran masalah-masalah sosial, khususnya perkembangan penalaran moral.

Kohlberg (1971 :55-56) mengutarakan bahwa konsep moralitas lebih merupakan konsep yang filosofis (etis) daripada sekedar konsep tingkah laku. Dengan analisa filosofis Kohlberg menyimpulkan bahwa struktur

esensi moralitas adalah prinsip keadilan (*the principle of justice*) dan bahwa inti keadilan adalah distribusi hak dan kewajiban yang diatur oleh konsep kesetaraan (*equality*) dan timbal balik (*reciprocity*). Prinsip moral bukan merupakan aturan-aturan untuk suatu tindakan, tetapi prinsip moral merupakan alasan suatu tindakan. Menurut Kusdwiratri (1982: 79) Kohlberg menggunakan istilah *moral reasoning/moral thinking/moral judgement* secara bergantian dengan pengertian yang sama.

Prinsip moral yang merupakan alasan untuk suatu tindakan, sesuai dengan teori perkembangan kognitif yang dianut yaitu memandang pertimbangan moral sebagai struktur, bukan isi (*content*). Jadi pertimbangan moral bukan pada apa yang baik atau buruk, melainkan bagaimana seseorang sampai pada keputusan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Hal ini berarti, bahwa pertimbangan moral merupakan suatu alasan atau pemilihan, mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk.

Ada dua keuntungan dengan menganggap pertimbangan moral sebagai struktur dan bukan isi (Kusdwiratri, 1982: 81) : 1) Pertimbangan moral dianggap sebagai isi, maka apa yang baik dan buruk terkait pada sosio budaya tertentu, sedangkan bila pertimbangan moral dianggap sebagai struktur, maka hal ini berpegang pada prinsip filosofis moralitas, sehingga pertimbangan moral bersifat universal. Universalitas moral berarti semua kultur mempunyai konsep dasar moralitas yang sama, misalnya : cinta, hormat, kemerdekaan dan kekuasaan. 2) Bila pertimbangan moral dianggap sebagai isi, maka orang tidak dapat membedakan pertimbangan moral anak-

anak dan dewasa. Dari anggapan pertimbangan moral sebagai struktur, memungkinkan untuk mengidentifikasi perkembangan moral.

Selanjutnya Kohlberg menyatakan bahwa pertimbangan moral cenderung bersifat universal, inklusif, konsisten dan berdasar objektif, impersonal atau berlatar belakang ideal. Pertimbangan moral adalah proses dimana seseorang memilih salah satu tindakan terbaik secara moral (Rest & Narvaez, dalam Kurtines & Gewirtz, 1991: 243). Selain itu Kohlberg (Lickona, 1976: 32) menyatakan bahwa pertimbangan moral yang lebih maju tergantung pada penalaran logik yang maju pula. Jadi dapat dikatakan bahwa pertimbangan moral dapat berkembang.

Perkembangan moral oleh Kohlberg, digambarkan dalam serangkaian tahap dimana orang meningkat pertimbangan moralnya. Ada enam tahap yang secara umum diklasifikasikan dalam tiga tingkat.

#### **Tahap Perkembangan Moral Kohlberg**

<b>Tingkat</b>	<b>Tahap</b>	<b>Orientasi Sosial</b>
Pre- Conventional	1	Obedience & Punishment
	2	Individualism, Instrumentalism & Exchange
Conventional	3	Goodboy/Goodgirl
	4	Law & Order
Post- Conventional	5	Social Contract
	6	Principled Conscience

Tipologi ini berisi tiga tingkatan pemikiran moral yang berbeda, dan masing-masing tingkatan ini dibedakan lagi dua tahap yang saling berkaitan. Semua tingkatan dan tahapan ini dapat dipandang sebagai filsafat moral tersendiri, atau pandangan yang berbeda mengenai dunia sosial-moral (Kohlberg, 1995: 125). Tahapan-tahapan pertimbangan moral tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Tingkat PraKonvensional**

Pada tahap ini anak tanggap terhadap aturan-aturan budaya dan terhadap ungkapan-ungkapan budaya mengenai baik dan buruk, benar dan salah. Akan tetapi hal ini ditafsirkan dari segi akibat fisik atau kenikmatan perbuatan (hukuman, keuntungan, pertukaran kebaikan). Pada tingkat ini ada dua tahap, yaitu tahap orientasi hukuman dan kepatuhan dan tahap orientasi relativis-instrumental.

#### **a) Tahap 1: Tahap Orientasi Hukuman dan Kepatuhan.**

Akibat-akibat fisik suatu perbuatan menentukan baik buruknya perbuatan, tanpa menghiraukan arti dan nilai manusiawi dari akibat tersebut. Anak hanya semata-mata menghindarkan hukuman dan tunduk pada kekuasaan tanpa mempersoalkannya.

#### **b) Tahap 2: Tahap Orientasi Relativis-instrumental.**

Perbuatan yang benar adalah perbuatan yang merupakan cara atau alat untuk memuaskan kebutuhannya sendiri dan kadang-kadang juga kebutuhan orang lain. Hubungan antar manusia dipandang seperti

hubungan di pasar. Elemen kewajaran tindakan yang bersifat resiprositas dan pembagian sama rata, tetapi ditafsirkan secara fisik dan pragmatis. Resiprositas ini merupakan hal "Jika engkau menggaruk punggungku, nanti aku juga akan menggaruk punggungmu", dan bukan karena loyalitas, rasa terima kasih atau keadilan.

## **2. Tingkat Konvensional**

Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa, dan dipandang sebagai hal yang bernilai dalam dirinya sendiri, tanpa mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Sikapnya bukan saja konformitas terhadap harapan pribadi dan tata tertib sosial, melainkan juga loyal terhadapnya dan secara aktif mempertahankan, mendukung dan membenarkan seluruh tata tertib itu serta mengidentifikasikan diri dengan orang atau kelompok yang terlibat. Tingkat ini mempunyai dua tahap:

### **a) Tahap 3: Tahap Orientasi Kesempatan antara Pribadi atau Orientasi**

Perilaku yang baik adalah yang menyenangkan dan membantu orang lain serta yang disetujui oleh mereka, banyak konformitas terhadap gambaran stereotip mengenai apa itu perilaku mavoritas atau "alamiah". Perilaku sering dinilai menurut niatnya. Ungkapan "dia bermaksud baik" untuk pertama kalinya menjadi penting. Orang mendapatkan persetujuan dengan menjadi "baik".

**b) Tahap 4: Tahap Orientasi Hukum dan Ketertiban.**

Adanya orientasi terhadap otoritas, aturan yang tetap dan penjagaan tata tertib sosial. Perilaku yang baik adalah semata-mata melakukan kewajiban sendiri, menghormati otoritas dan menjaga tata tertib sosial yang ada, sebagai yang bernilai dalam dirinya sendiri.

**3. Tingkat Pasca-Konvensional, Otonom atau yang Berlandaskan prinsip**

Pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral yang memiliki keabsahan dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang pada prinsip-prinsip itu dan terlepas pula dari identifikasi individu sendiri dengan kelompok tersebut. Ada dua tahap yaitu :

**a) Tahap 5: Tahap Orientasi Kontrak Sosial Legalistis.**

Pada umumnya tahap ini bernada semangat utilitarian. Perbuatan yang baik cenderung dirumuskan dalam kerangka hak dan ukuran individual umum yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Adanya kesadaran yang jelas mengenai relativisme nilai dan pendapat pribadi bersesuaian dengannya, suatu penekanan atas aturan prosedural untuk mencapai kesepakatan. Terlepas dari apa yang telah disepakati secara konstitusional dan demokratis, hak adalah soal "nilai" dan "pendapat" pribadi. Hasilnya adalah penekanan pada sudut pandang legal, tetapi

dengan penekanan pada kemungkinan untuk mengubah hukum berdasarkan pertimbangan rasional mengenai manfaat sosial dan bukan membekukan hukum itu sesuai dengan tata tertib gaya tahap 4. Di luar bidang hukum, persetujuan bebas dan kontrak merupakan unsur kewajiban.

**b) Tahap 6: Tahap Orientasi Prinsip Etika Universal.**

Hak ditentukan oleh keputusan suara batin, sesuai dengan prinsip-prinsip etis yang dipilih sendiri dan yang mengacu pada komprehensivitas logis, universalitas, konsistensi logis. Prinsip-prinsip ini bersifat abstrak dan etis (kaidah emas imperatif kategoris). Pada hakikatnya inilah prinsip-prinsip universal keadilan, resiprositas dan persamaan hak asasi manusia serta rasa hormat terhadap manusia sebagai pribadi individual. Tingkah laku moral yang sesungguhnya baru timbul pada masa remaja. Masa remaja sebagai periode masa muda harus dihayati betul-betul untuk dapat mencapai tingkah laku moral yang otonom, dan eksistensi masa muda sebagai keseluruhan merupakan masalah moral dan bahwa hal ini harus dilihat sebagai hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai. Tingkah laku tersebut menuntut suatu tingkat perkembangan intelektual serta pembentukan penilaian yang tinggi. Pembentukan penilaian ini terjadi atas dasar interaksi antara potensi-potensi yang ada dan oleh faktor-faktor lingkungan. Hal ini terjadi sedemikian rupa, sehingga proses menjadi dewasa dan proses emansipasi membawa individu ke arah penilaian yang mandiri

yang mempunyai konsekuensi penting bagi dirinya sendiri (Further dalam Monks, dkk. 1998: 226).

Tingkat prakonvensional digunakan oleh mereka yang memiliki alasan-alasan kurang matang, yang hanya mencari kepuasan atau pemenuhan kebutuhan pribadi, tanpa mempertimbangkan keadilan atau orang lain. Tingkat konvensional digunakan oleh orang-orang, pada umumnya berhubungan dengan kelompok masyarakat di mana mereka tinggal, sedangkan tingkat poskonvensional (pasca konvensional), jauh kedepan melebihi kelompok-kelompok atau masyarakat. Oleh karena itu, biasanya tidak dipengaruhi oleh sistem-sistem hadiah dan hukuman-hukuman dari masyarakat, sebagaimana mereka berpegang pada prinsip-prinsip keadilan yang universal. Alasan-alasan moral pada tingkat ini tidak begitu berhubungan dengan hadiah-hadiah yang menyertai peraturan-peraturan dalam masyarakat.

Jadi, pertimbangan moral adalah alasan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Pertimbangan moral disini merupakan suatu proses pertimbangan dalam kognitif sebelum suatu tindakan moral dilakukan seseorang. Pertimbangan ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada dilema perbuatan moral, sehingga ia diminta melakukan pemilihan keputusan moralnya berdasarkan pertimbangan moral itu.

#### **e. Prinsip-Prinsip Moral**

Kohlberg telah menyatakan bahwa hanya tahap-tahap pemikiran moral yang lebih tinggi memiliki ciri-ciri formal pertimbangan yang khas

moral. Perlu dijelaskan dan diperdalam pengertian mengenai ciri-ciri pemikiran moral yang matang dengan menjelaskan pencirian atas tahap-tahap tertinggi sebagai hal yang berlandaskan prinsip. Banyak, walaupun tidak semua, ulasan filosofis terhadap moralitas memandang ciri khas pokok dari putusan moral yang memadai sebagai hal yang berasal dari prinsip-prinsip moral. Bahwa pertimbangan nilai tidak secara langsung didasarkan atas prinsip-prinsip. Pada waktu menilai segelas martini atau sebuah lukisan dan sebuah naskah ilmiah sebagai hal yang baik, maka kita tidak berusaha mengasalkan penilaian kita pada suatu prinsip. Apabila suatu lukisan yang jelek diciptakan menurut prinsip, maka amat buruklah bagi suatu prinsip itu. Meskipun demikian, sebuah pengertian bahwa terdapat suatu pertimbangan yang khas moral, menuntut bahwa penilaian moral diadakan berdasarkan prinsip. Menurut Hare (Kohlberg, 1995: 116), mengenai ciri-ciri formal yang khas dari moralitas sebagai "keharusan" (preskriptivitas) dari "universalitas" (pada gilirannya keduanya mengandung arti "otonomi" pilihan moral atau kewajiban moral). Pendapat Hare menggemakan pandangan Kant, yang mendefinisikan preskripvitas dalam arti imperatif kategoris (sebagai lawan dari imperatif hipotetis).

Secara empiris Kohlberg (1995) telah menemukan bahwa kedua ciri ini saling berkaitan, sehingga suatu penilaian gaya tahap 6 mengenai kebaikan yang bersifat preskriptif atau bebas dari berbagai kecerderungan diri dan keyakinan orang lain juga merupakan suatu penilaian kebaikan yang berlaku untuk semua manusia. Apabila usaha dilaksanakan untuk

merumuskan penilaian preskriptif dan universal, maka penilaian tersebut hampir selalu diungkapkan menurut prinsip moral. Oleh karena itu untuk memahami moralitas tahap 6, perlu mengerti sifat dasar dan cara berfungsinya prinsip-prinsip moral.

Suatu prinsip moral merupakan suatu cara memilih yang universal, suatu aturan memilih yang kita inginkan agar dikenakan pada semua orang dalam segala situasi. Semua orang yang bijak memaksudkan "prinsip moral" sebagai suatu pedoman umum untuk memilih dan bukannya sebagai suatu peraturan konkret untuk bertindak. Pengertian yang paling tegas mengenai prinsip adalah pengertian yang telah didefinisikan oleh ajaran utilitarian murni yang menentukan prinsip tunggal "*maxim utilitarian*" yaitu bertindaklah selalu untuk memaksimalkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi orang sebanyak-banyaknya. Gagasan tegas mengenai prinsip ini mengandung arti suatu maksim tunggal untuk memilih yang secara logis atau intuitif bersifat rasional dan jelas dari sendirinya.

Gagasan tersebut dapat dideduksikan setiap tindakan kongkret yang benar secara moral dalam suatu situasi, apabila fakta-fakta situasi diangkat sebagai premis minor dari deduksi tersebut. Gagasan tegas mengenai prinsip semacam itu merupakan hal yang tidak hanya dapat diuniversalisasikan bagi semua manusia dan pada segala situasi, melainkan juga secara mutlak menentukan setiap tindakan yang benar dalam situasi apa pun (Kohlberg, 1995: 167).

Dengan demikian, di dalam butir-butir kategori yang rinci dalam penilai moral itu. diangkat kategori prinsip berikut ini: kebijakan, realisasi diri, kesejahteraan orang lain, penghormatan terhadap otoritas, kemasyarakatan atau pribadi-pribadi, dan keadilan.

Menurut Franz Magnis Suseno (1995: 17--21) pada prinsip-prinsip itu semua norma moral yang lebih konkret harus diukur. Prinsip-prinsip moral tersebut, yaitu:

a. Prinsip Sikap Baik

Prinsip moral dasar pertama dapat di sebut sebagai prinsip sikap baik. Prinsip itu mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain. Baru atas dasar tuntutan ini semua tuntutan moral lain masuk akal. Prinsip ini mempunyai arti yang amat besar bagi kehidupan manusia. Hanya karena prinsip itu memang diresapi dan rupa-rupanya mempunyai dasar dalam struktur psikis manusia, seseorang dapat bertemu dengan orang yang belum dikenal tanpa takut. Sikap dasar itu membuat seseorang dapat mengendaiikan bahwa orang lain, kecuali mempunyai alasan khusus, tidak langsung mengancam atau merugikannya. Sikap dasar itu membuat seseorang selalu mengumpamakan bahwa yang memerlukan alasan bukan sikap yang baik, meainkan sikap yang buruk.

Jadi yang biasa pada manusia bukan sikap memusuhi dan mau membunuh, meainkan sikap bersedia untuk menerima baik dan membantu. Oleh karena itu, berulang kali seseorang dapat mengalami bahwa orang yang sama sekali tidak dikenal, secara spontan membantunya

dalam kesusahan. Jadi, prinsip sikap baik bukan hanya sebuah prinsip yang difahami secara rasional, melainkan juga mengungkapkan syukur, suatu kecondongan yang memang sudah ada dalam watak manusia. Prinsip sikap baik, menyangkut sikap dasar manusia yang harus meresapi segala sikap kongkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip ini menyatakan bahwa pada dasarnya, kecuali ada alasan yang khusus, manusia harus mendekati siapa saja dan apa saja dengan positif, dengan menghendaki yang baik bagi dia. Bukan semata-mata perbuatan baik dalam arti sempit, melainkan sikap hati positif terhadap orang lain, kemampuan baik terhadapnya. Bersikap baik berarti, memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi saya, melainkan menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan dan menunjang perkembangannya, mendukung kehidupan dan mencegah kematiannya demi dia itu sendiri.

Bagaimana sikap baik itu harus dinyatakan secara kongkret tergantung pada apa yang baik dalam situasi kongkret itu. Prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realita supaya dapat diketahui apa yang masing-masing baik bagi yang bersangkutan. Kalau itu sudah diketahui, maka diketahui juga bagaimana prinsip sikap baik mesti diterapkan dalam situasi itu. Prinsip sikap baik mendasari semua norma moral karena hanya atas dasar prinsip itu masuk akal bahwa manusia harus bersikap adil, atau jujur, atau setia kepada orang lain.

#### b. Prinsip Keadilan

Prinsip sikap keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan (misalnya karena orang itu tidak membutuhkan bantuan). Suatu perlakuan yang tidak sama selalu dibenarkan secara khusus, sedangkan perlakuan yang sama dengan sendirinya betul kecuali terdapat alasan-alasan khusus. Secara singkat keadilan menuntut agar manusia jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang.

#### c. Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri

Prinsip ini mengatakan bahwa manusia wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah *person*, pusat pengertian dan kehendak, yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Manusia tidak boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri. Nilainya bukan sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu maksud atau tujuan lebih jauh. Hal ini juga berlaku bagi diri sendiri. Maka manusia juga wajib memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. seseorang wajib menghormati martabat dirinya sendiri.

Kesimpulannya dapat dikatakan bahwa kebaikan dan keadilan yang di tunjukkan kepada orang lain, perlu diimbangi dengan sikap yang menghormati diri sendiri sebagai makhluk yang bernilai. Seseorang semestinya mau berbaik kepada orang lain dan bertekad untuk bersikap adil, tetapi tidak dengan membuang diri.

Dalam pandangan Kohlberg (Djamiludin & Nashori, 1995: 28) prinsip moral merupakan gabungan nilai-nilai moral pada tingkat poskonvensional, baik tahap kelima maupun tahap keenam.

#### **f. Pertimbangan Moral Remaja**

Remaja sebetulnya tidak punya tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak, tetapi tidak juga termasuk golongan dewasa atau golongan tua. Secara jelas masa anak dapat dibedakan dari masa dewasa dan masa tua. Seorang anak masih belum selesai perkembangannya, orang dewasa dapat dianggap sudah berkembang penuh. Ia sudah menguasai sepenuhnya fungsi-fungsi fisik dan psikisnya. Pada masa tua umumnya terjadi kemunduran terutama dalam fungsi psikisnya. Pada remaja masih belum mampu untuk menguasai fungsi fisik maupun psikisnya (Monks, dkk. 1998: 217).

Remaja merupakan masa peralihan antara masa anak dan masa dewasa yaitu antara 12 sampai 21 tahun (Gunarsa, 1991: 43). Pada masa transisi ini terjadi pertumbuhan pesat dalam diri remaja menyangkut segala aspek seperti perubahan fisik, emosi, kognisi, kevakinan, dan moral. Perkembangan berpikir remaja sesuai dengan perkembangan berpikir yang

dikemukakan oleh Piaget, yaitu telah mencapai kemampuan berpikir formal. Kemampuan berpikir formal ini pada umumnya dimulai pada usia 12 tahun dan menguat pada masa remaja.

Seiring dengan perkembangan berpikir remaja, perkembangan penalaran moralnya berada pada tingkat moral *conventional*, yaitu tahap tiga dan empat, akan tetapi ada juga yang masih berada pada tingkat *pre-conventional*. Pada akhir usia belasan, ada beberapa remaja yang mencapai tingkat pasca *conventional* atau tingkat prinsip (Watson dan Lindgren, 1979: 112).

Remaja diharapkan dapat mengkoordinasikan konsep-konsep moralnya dalam berbagai situasi. Remaja dalam menilai suatu tingkah laku dalam hubungannya dengan anak-anak (Hurlock, 1990: 73), karena pada masa inilah mereka mengembangkan kemampuan memperdalam refleksi untuk menemukan makna dan hubungan-hubungannya.

Perkembangan moral yang dicapai pada kebanyakan remaja adalah tahap konvensional, yaitu tahap ketika seseorang sangat memperhatikan aturan-aturan sosial, harapan-harapan, serta peran-peran. Tindakan-tindakan yang dianggap benar dilakukan karena adanya motivasi yang ada dalam diri seseorang untuk melakukan apa yang diterima dan diharapkan oleh masyarakat.

#### **g. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Moral**

Menurut Kohlberg (dalam Duska dan Whelan, 1982: 286) ada lima yang mempengaruhi pertimbangan moral, yaitu kesempatan alih peran,

konflik sosiokognitif, dan keagamaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan moral dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor-faktor internal, yaitu:

a. Kesempatan alih peran

Alih peran merupakan proses kognitif dan proses sosial yang menunjukkan bahwa individu dapat menempatkan diri pada motif-motif, perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain. Hal ini berarti individu mampu untuk melepaskan diri dari pandangannya sendiri, mampu memandang dunia luar dari sudut pandang orang lain. "Dapat menempatkan diri pada perasaan orang lain" mengandung arti juga dapat ikut merasakan secara empati, yaitu ikut merasakan perasaan orang lain (Monks, dkk. 1998: 289). Kemampuan ini merupakan keadaan kognitif yang memungkinkan seseorang pada tingkat konvensional menyadari keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan-kekurangan pada egoisme dan melihat pentingnya kerjasama dalam kelompok (Duska dan Whelan, 1982: 84)). Empati mempengaruhi daya nalar seseorang.

Perlunya alih peran dalam peningkatan pertimbangan moral seseorang berkaitan dengan pengertian moralitas yang telah diutarakan sebelumnya, yaitu bagaimana menyelesaikan situasi konflik antara kepentingan diri dan orang lain. Alih peran, situasi konflik tersebut dapat diselesaikan secara adil, atas dasar

pertimbangan dua belah pihak. Ada beberapa kesempatan alih peran yang mungkin dialami oleh seseorang, seperti melalui hubungan antara individu dalam keluarga, dalam kelompok sebaya, di sekolah dan di masyarakat luas. Salah satu faktor yang menentukan peningkatan pertimbangan moral dalam keluarga adalah bila orang tua mendorong terjadinya dialog yang intensif, khususnya mengenai nilai-nilai. Dialog yang intensif maka akan terjadi transfer sudut pandang serta sikap-sikap yang disebut kesempatan alih peran.

Remaja yang banyak berinteraksi atau berpartisipasi dalam pergaulan dengan teman sebaya, akan meningkat pertimbangan moralnya dibandingkan dengan mereka yang sedikit berinteraksi atau berpartisipasi dalam pergaulan sosial dengan teman sebaya. Hal ini berarti pula bahwa variasi dalam pergaulan akan memberikan kesempatan yang lebih banyak pada remaja untuk melakukan alih peran yang bervariasi pula. Simulasi yang dilakukan Nashori (1995) menunjukkan bahwa alih peran berpengaruh dalam meningkatkan moral.

#### b. Konflik sosio-kognitif

Mutu lingkungan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan kepada cepatnya perkembangan dan tingkat perkembangan yang dicapai oleh seseorang (Duska dan Whelan, 1982). Hal ini terlihat pada pengaruh konflik sosio kognitif terhadap penalaran moral seseorang. Konflik sosio kognitif ini akan terjadi

ketika individu berhadapan dengan pandangan yang berbeda. Dialog yang melibatkan banyak individu, munculnya keragaman pandangan adalah hal yang umum terjadi. Di antara keragaman pandangan ini dalam diri individu juga terjadi dialog internal individu. Apabila individu mampu memahaminya dan mendudukan pandangan-pandangan tersebut dalam suatu struktur berpikir tertentu, maka individu mungkin akan biasa segera mengadakan penyelesaian. Sebaliknya, apabila individu gagal memahaminya dalam suatu struktur berpikir yang benar, maka individu tidak akan mampu menyelesaikan konflik sosio kognitif yang terjadi dalam dirinya.

Dengan ungkapan lain, dapat dikatakan bahwa keadaan tidak seimbang (*disequilibrium*) selalu diiringi dengan keinginan untuk menjadi seimbang kembali. Keadaan seimbang ini akan tercapai apabila individu dapat menyelesaikan masaiah ketidakseimbangan itu, yaitu dapat memahami suatu masaiah dengan suatu pemikiran yang menggunakan struktur uyang lebih tinggi dari struktur yang dimilikinya saat itu. Individu dapat memahami atau menggunakan struktur berpikir yang lebih tinggi tersebut yang pada mulanya membingungkannya. Pemahaman ini diperoleh individu melalui proses reorganisasi struktur pikiran yang dilakukannya.

#### c. Faktor pembawaan

Menurut Hurlock faktor pembawaan ini terutama yang dibicarakan adalah inteligensi, karena inteligensi mempunyai

pengaruh yang sangat penting terhadap tingkat moralitas yang mampu dicapai oleh seseorang, kecakapan seseorang untuk bertindak dengan lingkungan secara efektif (Wechsler dalam Monks dkk. 1998: 216).

d. Faktor segi keagamaan

Kejujuran dan nilai-nilai moralitas yang diperlihatkan seorang anak tergantung sepenuhnya pada penghayatan nilai-nilai keagamaan dalam bertingkah laku dengan orang lain.

2. Sementara faktor-faktor eksternal, yaitu :

a. Iklim moral sosial

Iklim moral dari lingkungan sosial mempunyai potensi untuk dipersepsikan lebih tinggi dari tahap penalaran moral anggotanya. Rangsangan lingkungan sosial ini tidak hanya terbatas pada rangsangan penalaran terhadap masalah-masalah sosial, tetapi juga melalui peragaan tindakan bermoral dan peragaan peraturan bermoral.

b. Lingkungan rumah

Sikap dan tingkah laku anak dipengaruhi oleh bagaimana sikap orang-orang yang berada dalam rumah. Orang tua harus menciptakan suasana keramahan, kejujuran dan kerja sama sehingga anak selalu cenderung untuk melakukan hal-hal yang baik serta mendorong terjadinya dialog tentang masalah nilai-nilai moral (Gunarsa, 1981: 66).

g. Lingkungan sekolah

Corak hubungan antara anak dan guru atau murid yang lain akan mempengaruhi nilai-nilai moral yang masih mengalami perubahan. Kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, murid memperoleh kesempatan untuk berlatih dan mengembangkan nilai-nilai moral.

h. Aktivitas rekreasi

Aktivitas anak dalam mengisi waktu luang akan mempengaruhi konsep moralitas anak, melalui bacaan, film, radio, televisi, banyak mempengaruhi norma-norma moral yang dirasakan tidak sesuai dengan prinsip moral yang dimilikinya. Oleh karena itu tingkah laku yang dicerminkannya cenderung tetap.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Hubungan Antara Tahap Perkembangan Penalaran Moral Dengan Kecenderungan Kenakalan Remaja Siswa Sekolah Menengah Atas di Surakarta.

Skripsi Yenny Widyasari (2008) yang berjudul “Hubungan Antara Tahap Perkembangan Penalaran Moral Dengan Kecenderungan Kenakalan Remaja Siswa Sekolah Menengah Atas di Surakarta” ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tahap penalaran moral dengan kecenderungan kenakalan remaja.

Hasil penelitiannya di seluruh populasi yaitu siswa SMA di Surakarta. Sampel diambil sebanyak 145 siswa dengan teknik pengambilan

sampel *multistage cluster random sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara tahap perkembangan moral dengan kecenderungan kenakalan remaja siswa sekolah SMA di Surakarta. Semakin tinggi perkembangan penalaran moral maka akan diikuti kenakalan remaja yang rendah. Tingkat penalaran moral yang telah dicapai oleh seseorang akan mempengaruhi perilaku moralnya.

Penalaran moral dalam penelitian tersebut merupakan istilah lain dari pertimbangan moral, sebab orientasi moral oleh Kohlberg sering pula disebut sebagai pertimbangan moral (*moral judgement*) dan penalaran moral (*moral reasoning*).

2. Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua dan Gaya Pergaulan Teman Sebaya Dengan Pengambilan Keputusan Moral Siswa SMP di Kota Yogyakarta.

Skripsi Tyas Sartika (2007) yang berjudul “Hubungan Gaya Pengasuhan Orang Tua dan Gaya Pergaulan Teman Sebaya Dengan Pengambilan Keputusan Moral Siswa SMP di Kota Yogyakarta” ini bertujuan untuk mengetahui hubungan gaya pengasuhan orang tua dengan pengambilan keputusan moral dan hubungan gaya pergaulan teman sebaya dengan keputusan moral siswa.

Hasil penelitiannya di seluruh populasi yaitu siswa SMP di kota Yogyakarta. Sampel diambil 100 siswa dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *multistage cluster random sampling*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa :

- a) Gaya pengasuhan orang tua mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pengambilan keputusan moral. Semakin positif gaya pengasuhan orang tua, bersifat mendorong kognitif maupun afektif maka akan semakin membuat anak usia remaja yakin bahwa mereka didampingi oleh orang tua terutama ketika mengambil keputusan-keputusan yang didalamnya mengandung moralitas sehingga anak usia remaja dapat mengambil keputusan dengan mengedepankan rasionalitas dan suara hati.
- b) Gaya pergaulan teman sebaya mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pengambilan keputusan moral. Semakin tinggi pergaulan teman sebaya maka semakin tinggi pula pengambilan keputusan dengan pemecahan masalahnya.

### **C. Kerangka Berfikir**

*Moral disengagement* seseorang disini dapat memfasilitasi pengambilan keputusan yang tidak etis atau buruk dan *moral disengagement* terbentuk atau terjadi dengan dukungan aspek-aspek atau faktor-faktor personal yang berasal dari pikiran (kognisi) moral, serta reaksi diri afektif dan faktor lingkungan yang semuanya saling berinteraksi dengan tindakan moral seseorang. Jadi, *moral disengagement* dalam hal ini memfasilitasi tindakan moral yang buruk oleh seseorang.

Salah satu aspek kognisi moral adalah orientasi moral. Orientasi moral adalah suatu konsep tentang kerangka atau perspektif yang berbeda untuk menyusun atau memahami domain moral. Orientasi moral merupakan bagian

kognisi moral. Orientasi moral oleh Kohlberg sering disebut juga sebagai pertimbangan moral atau *moral judgement*. Dari hasil-hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil adanya hubungan yang positif antara pertimbangan moral dengan tindakan moral, semakin tinggi pertimbangan moral, maka semakin mendukung ke arah tindakan moralnya. Sementara, *moral disengagement* dalam hal ini memfasilitasi pengambilan keputusan atau terjadinya tindakan, khususnya tindakan moral yang buruk. Maka dalam hal ini pertimbangan moral diduga memiliki hubungan dengan *moral disengagement*.

Jadi, pertimbangan moral merupakan aspek yang terkait dengan *moral disengagement*. Jika pertimbangan moral seseorang tinggi seharusnya moral disengagemennya buruk. Begitu sebaliknya, jika pertimbangan moral seseorang rendah atau buruk maka seharusnya moral disengagemennya baik.

Siswa yang sedang duduk di bangku sekolah merupakan calon penerus generasi bangsa ke depan. Dimana siswa-siswa dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Kriteria warga negara yang baik adalah warga negara yang mempunyai *civic skil* (ketrampilan), *civic knowledge* (pengetahuan), *civic disposition* (sikap). Jadi, dengan rendahnya *moral disengagement* maka akan menjadikan siswa untuk bersikap etis sebagaimana mestinya agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan salah satu kriteria warga negara yang baik yakni, *civic disposition* (sikap).



Gambar 1. Skema Penelitian

#### **D. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

Ada hubungan yang negatif antara pertimbangan moral dengan *moral disengagement* pada siswa SMA se Kabupaten Sleman.